

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan jumlah lebih dari 17.504 pulau, Letak geografisnya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Kekayaan tersebut tentunya jika dimanfaatkan semaksimal mungkin dapat membawa negara ini ke arah lebih baik. Meskipun demikian, Indonesia masih termasuk dalam kategori negara berkembang dan terdapat banyak spekulasi seputar masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang memerlukan analisis yang lebih mendalam. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Negara Indonesia salah satu yakni masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi hambatan dalam pembangunan karena kompleksitasnya yang sangat besar, sehingga negara sulit untuk mengatasi kemiskinan tanpa bantuan dari pihak lain. Artinya, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara holistik dan dengan dukungan semua pihak (Juniar, 2023).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang hampir di alami oleh setiap negara terbelakang dan negara berkembang di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan masalah kemiskinan yang cukup kompleks dan belum teratasi dengan maksimal sampai sekarang. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) (Shintia, 2022)

Implementasi penanganan kemiskinan di Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Salah satu penanganan fakir miskin di Indonesia melalui pendekatan wilayah, hal ini merujuk pada kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah. Salah satu upaya mengatasi kemiskinan dengan penyaluran bantuan sosial non tunai, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Salah satu program bantuan sosial non tunai di Indonesia yaitu Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia telah dikeluarkan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menjelaskan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Pasal 2).

Tujuan dari PKH yaitu untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta mengenalkan

manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Rahmawati, 2023).

Program PKH sudah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Gampong Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Ketua PKH Gampong Blang Naleung Mameh bahwa program PKH sudah terlaksana di Gampong tersebut sejak tahun 2010 hingga saat ini. Pada masa sekarang penerima bantuan PKH di Gampong Blang Naleung Mameh berjumlah 45 penerima. Program tersebut ditujukan kepada penerima yang memiliki komponen pendidikan yaitu anak yang masih bersekolah dari SD, SMP dan SMA, komponen kesehatan yaitu balita usia baru lahir sampai 6 tahun, dan ibu hamil. Komponen kesejahteraan sosial yaitu disabilitas berat yaitu kondisi dimana seseorang memiliki keterbatasan fungsi yang signifikan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan tidak dapat menghidupi diri sendiri dan lansia yaitu usia 60 tahun ke atas (Wawancara awal, 2 Februari 2025).

Bantuan PKH yang didapatkan oleh masyarakat berupa uang. Jumlah bantuan diterima berdasarkan komponen yaitu anak sekolah SD mendapatkan bantuan Rp 225.000, SMP mendapatkan bantuan Rp 375.000, SMA mendapatkan bantuan Rp 500.000, balita mendapatkan bantuan Rp 750.000, Ibu hamil mendapatkan bantuan Rp 750.000, disabilitas berat mendapatkan bantuan Rp 600.000, dan lansia mendapatkan bantuan Rp 600.000. Bantuan tersebut disalurkan setiap 3 bulan sekali. Penerima bantuan sudah memiliki buku bank BSI dan ATM yang diberikan oleh Kementerian Sosial untuk melakukan penarikan

bantuan tersebut (Wawancara awal dengan Ketua PKH Gampong Blang Naleung Mameh, 2 Februari 2025).

Penerima bantuan PKH yang berupa uang harus dipergunakan semestinya, seperti bantuan diberikan kepada anak yang masih sekolah sehingga penggunaan dana bantuan harus mendukung pendidikan anak tersebut seperti membeli seragam sekolah, buku dan peralatan menulis, membayar biaya SPP sekolah dan lainnya. Begitu juga bantuan PKH diberikan kepada ibu hamil dan balita dimana dana bantuannya harus dibelanjakan yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan seperti membeli susu dan makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita. Begitu juga untuk lansia dapat mempergunakan dana bantuan untuk membeli makanan bergizi dan biaya berobat ketika sakit (Wawancara awal dengan Pendamping PKH Gampong Blang Naleung Mameh, 2 Februari 2025).

Penerima bantuan PKH memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, seperti anak harus terdaftar di sekolah SD, SMP, dan SMA dan mengikuti kegiatan belajar 85% kehadiran setiap bulannya. Bagi ibu hamil dan balita harus mengikuti posyandu agar mendapatkan pelayanan kesehatan, dan bagi disabilitas berat dan lansia harus pergi berobat jika mengalami sakit lansia seperti influenza, hipertensi, penyakit sendi dan lainnya untuk mendapatkan layanan kesehatan lainnya minimal satu kali dalam setahun. Adanya bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, seperti membantu anak sekolah dalam menempuh pendidikan, memenuhi kebutuhan gizi balita, meningkatkan kualitas kesehatan bagi ibu hamil, lansia dan disabilitas berat (Wawancara awal dengan Pendamping Sosial PKH Gampong Blang Naleung Mameh, 7 Februari 2025).

Penerima bantuan sosial PKH terdiri dari komponen pendidikan yaitu anak sekolah SD berjumlah 12, sekolah SMP berjumlah 10 orang, sekolah SMA berjumlah 7 orang. Penerima PKH yang memiliki komponen kesehatan terdiri ibu hamil berjumlah 3 orang dan anak balita berjumlah 16 orang. Sedangkan penerima PKH yang memiliki komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lansia berjumlah 6 orang, dan disabilitas berjumlah 3 orang (Wawancara awal dengan Pendamping Sosial PKH Gampong Blang Naleung Mameh, 7 Februari 2025).

Permasalahan yang terjadi di Gampong Naleung Mameh dimana masyarakat miskin yang seharusnya layak untuk mendapatkan bantuan sosial PKH namun kenyataannya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Bahkan ada penerima PKH yang memiliki komponen dan layak mendapatkan bantuan PKH namun bantuannya tidak disalurkan lagi. Sedangkan penerima bantuan yang dipandang kurang layak namun kenyataannya mendapatkan bantuan sosial PKH (Wawancara awal dengan Geuchik Gampong Blang Naleung Mameh, 9 Februari 2025).

Kondisi lainnya yang terjadi masih adanya penerima PKH yang memiliki komponen kepesertaan tetapi tidak keluar bantuan PKH. Sebagai contoh terdapat 6 anak sekolah yang terdiri 3 sekolah SMP dan 3 masih sekolah SMA yang saat ini aktif bersekolah namun tidak keluar bantuan PKH. Begitu ada Ibu hamil yang berjumlah 3 orang tidak keluar bantuan PKH. Selain itu terdapat 16 balita yang tidak cair bantuan PKH, hingga 4 orang lansia yang tidak dicairkan bantuan PKH. Seharusnya penerima bantuan sosial itu dapat dicairkan bantuannya karena memiliki komponen kepesertaan (Wawancara awal dengan Ketua PKH di Gampong Blang Naleung Mameh, 9 Mei 2025).

Kemudian, anak penerima PKH di Gampong Naleung Mameh yang tidak bersekolah dan pada akhirnya memilih putus sekolah. Pada tahun 2024 terdapat 6 anak penerima PKH yang putus sekolah sehingga bantuan PKH diputuskan. Sebagian penerima PKH ada yang berhutang pada tetangganya untuk memenuhi keperluan pendidikannya. Seharusnya adanya bantuan PKH dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, dan juga membelanjakan makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi balita (Wawancara awal dengan Pendamping Sosial PKH Gampong Blang Naleung Mameh, 7 Februari 2025).

Selain itu, masih terdapat perilaku penerima bantuan PKH yang tidak patuh terhadap persyaratan program, seperti ibu hamil yang tidak pergi posyandu, masih ada penerima PKH yang tidak mempergunakan bantuan tersebut sebagaimana mestinya, melainkan mempergunakan ke hal lain seperti berbelanja pakaian, peralatan rumah, kebutuhan pokok, bayar hutang/kredit dan lainnya. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program PKH kurang berdampak pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wawancara awal dengan Ketua PKH Gampong Blang Naleung Mameh, 12 Februari 2025). Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program PKH di Gampong Blang Nameung Mameh?
2. Bagaimana kondisi pendidikan dan kesehatan penerima program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini mengfokuskan pada implementasi program PKH di Gampong Blang Nameung Mameh. Penelitian ini juga difokuskan pada kondisi pendidikan dan kesehatan penerima program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi program PKH di Gampong Blang Nameung Mameh.
2. Mengetahui kondisi pendidikan dan kesehatan penerima program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan akademik yaitu dapat memperkaya kajian Sosiologi dalam mengkaji kondisi pendidikan dan kesehatan adanya program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi terutama mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membaca skripsi ini tentang pelaksanaan program PKH di Gampong Blang Nameung Mameh.